TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN VOLUME 3 ISSUE 1 (2023)

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG TERKAIT ANCAMAN PENGANGGURAN PASCA KENAIKAN INFLASI

Vonnylia^{1*}, Florensia Sutjiali², Nathania Jocelyn³, Johanes Prawira ⁴, Hendro⁵

¹⁻⁵Universitas Internasional Batam

E-mail: ¹⁾ 2141077.vonnylia@uib.edu, ²⁾ 2141050.florensia@uib.edu, ³⁾ 2141025.nathania@uib.edu, ⁴⁾ 2141272.johanes@uib.edu, ⁵⁾ 2141118.hendro@uib.edu

Abstract

One indicator of the cause of inflation is. Inflation and Unemployment have a role in making fiscal and monetary decisions of a country in improving its economic conditions. The purpose of this study is to analyze policies related to the threat of risk after the increase in inflation in the city of Malang. The data processing technique used in this research is qualitative, which is done by collecting the data that is roughly needed. The results revealed that the highest number of expenses in Malang City in 2021 with a total of 63.531, while the lowest number in 2019 with a total of 40.104. The highest amount of inflation in Malang City is in 2014, while the lowest inflation is in 2020. Fiscal policies that can be implemented the government in reducing the levels of movement, namely opening up job opportunities, adding State-Owned Enterprises, and creating job training centers to overcome the impact of inflation the government can make policies; reducing unexpected spending, offering support for 2% of the general allocation fund, increasing tax rates and providing maximum prices for certain goods.

Keywords: Industrialization, Inflation, Macroeconomics, Unemployment

Abstrak

Salah satu indikator penyebab inflasi adalah. Inflasi dan Pengangguran memiliki peran dalam pengambilan keputusan fiskal dan moneter suatu negara dalam memperbaiki kondisi perekonomiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kebijakan terkait ancaman risiko pasca kenaikan inflasi di Kota Malang. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang kira-kira dibutuhkan. hasil penelitian adalah jumlah pengeluaran tertinggi di Kota Malang pada tahun 2021 dengan jumlah 63.531, sedangkan jumlah terendah pada tahun 2019 dengan jumlah 40.104. Inflasi tertinggi di Kota Malang terjadi pada tahun 2014, sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2020. Kebijakan fiskal yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengurangi tingkat pergerakan yaitu membuka lapangan kerja, menambah BUMN, dan membuat balai latihan kerja untuk mengatasi dampak inflasi pemerintah dapat membuat kebijakan; mengurangi pengeluaran tak terduga, menawarkan dukungan untuk 2% dari dana alokasi umum, menaikkan tarif pajak, dan memberikan harga maksimal untuk barangbarang tertentu.

Kata Kunci: Ekonomi Makro, Industrialisasi, Inflasi, Pengangguran

AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN | TRANSEKONOMIKA https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika E-ISSN: 2809-6851 | P-ISSN: 2809-6851

TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan Volume 3 ISSUE 1 (2023)

1. PENDAHULUAN

Inflasi merupakan salah satu indikator yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Menurunnya daya beli masyarakat, dan menurunnya jumlah permintaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan akhirnya menurunkan jumlah produksi barang dan jasa oleh perusahaan merupakan dampak dari inflasi dan hubungannya dengan pengangguran. Dalam keadaan tersebut maka perusahaan akan mengurangi permintaan akan tenaga kerja yang berdampak pada mengurangnya kesempatan kerja sehingga mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Sebagai negara dengan penduduk yang banyak, warga negara yang mencari pekerjaan juga banyak, akan tetapi lapangan pekerjaan di Indonesia tidak sebanyak warga yang mencari pekerjaan, sebab itu, masih ada banyak pengangguran di negara Indonesia. Masalah pengangguran pada umumnya banyak ditemui di berbagai daerah sebagai efek samping dari industrialisasi. Pengangguran terjadi akibat dari ketidakstabilan kondisi pasar tenaga kerja dalam mengambil tenaga kerja yang tersedia. Akibatnya timbul tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan di dalam perekonomian. Hal ini merupakan dampak tidak langsung dari supply atau penawaran tenaga kerja yang melebihi demand atau permintaan tenaga kerja untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu; 1) besarnya supply daripada demand tenaga kerja; 2) lapangan kerja yang tidak banyak; 3) kebutuhan akan tenaga kerja terdidik yang tinggi (Adriyanto et al., 2020). Kota malang merupakan daerah perkotaan dan dikenal sebagai kota berpendidikan. perpindahan penduduk daerah sekitar ke kota malang menyebabkan jumlah angka pengangguran dikota bertambah. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang mengalami kenaikan pada tahun 2020. tercatat tingkat pengangguran pada tahun 2019 sebesar 5,88 persen sedangkan tahun 2020 menjadi 9,6 persen

Tabel 1 Inflasi Bulanan Tahun 2011-2022 Kota Malang

Tabel I milasi Balanan Tanan 2011 2022 Hota Manang												
Bulanan	Inflasi Bulanan di Kota Malang (%)											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	0.67	0.27	0.94	0.76	0.04	0.58	1.45	0.69	0.53	0.41	0.06	0.52
Februari	0.14	0.18	0.88	0.31	-0.57	-0.15	0.24	0.17	-0.42	0.28	-0.01	0.18
Maret	-0.09	0.01	0.93	0.43	0.34	0.02	-0.09	0.12	0.36	-0.41	0.08	0.63
April	-0.42	0.27	-0.21	-0.13	0.49	-0.40	0.35	0.14	0.44	-0.12	0.10	1.44
Mei	0.10	0.05	-0.35	0.37	0.45	0.15	0.82	0.29	0.35	0.27	0.14	0.51
Juni	0.56	0.54	0.91	0.31	0.38	0.63	0.37	0.25	-0.17	0.44	0.08	0.61
Juli	0.73	0.48	3.49	0.49	0.57	0.78	0.30	0.21	0.20	0.06	0.11	0.76
Agustus	0.94	1.04	0.77	0.47	0.28	-0.03	-0.57	0.05	0.19	-0.06	0.03	-0.03
September	0.22	0.52	-0.57	0.26	0.21	0.17	0.05	-0.31	-0.03	-0.05	-0.02	1.06
Oktober	0.12	0.22	0.16	0.40	0.03	-0.20	0.02	0.30	-0.04	-0.06	0.19	-0.11
November	0.34	0.23	0.23	1.51	0.16	0.45	0.27	0.37	0.01	0.31	0.26	-
Desember	0.67	0.70	0.53	2.72	0.89	0.58	0.49	0.65	0.50	0.34	0.73	-

Tabel 2 Inflasi Tahunan Tahun 2011-2022 Kota Malang

Klasifikasi Wilayah -	Inflasi Tahunan di Kota Malang										
	(%)										
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Kota Malang	1.75	1.42	1.93	2.98	3.75	2.62	3.32	8.14	7.92	4.6	4.05

Sumber: BPS Malang, 2021

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang merilis perkembangan inflasi tahunan di Kota Malang periode tahun 2011 sampai 2022. Dalam rilisan resmi tersebut, BPS mencatat angka inflasi di Kota Malang mengalami fluktuatif, dimana di tahun 2011 nilai inflasi sebesar 4.05, kemudian menggalami peningkatan di tahun 2012 menjadi 4.6, kemudian dalam dua tahun selanjutnya terus menggalami peningkatan hingga di tahu 2014 angka inflasi kota Malang mencapai nilai 8.14. Selanjutnya terus menggalami penurunan ditahun 2015 sebesar 3.32, tahun 2016 kembali menurun hingga 2.62 dan kembali menggalami kenaikan di tahun 2017 sebesar 3.75. kemudian menurun kembali hingga di tahun 2021 nilai inflasi Kota Malang sebesar 1.75. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan terkait ancaman risiko pasca kenaikan inflasi di Kota Malang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengangguran

Menurut Prayuda et al. (2015), Pengangguran adalah orang atau tenaga kerja yang belum memperoleh pekerjaan atau Orang yang tidak bekerja sama sekali dan sedang mencari pekerjaan, orang yang berkerja kurang dari dua hari selama seminggu atau orang yang berusaha mendapatkan pekerjaan.

2.2. Tingkat Penggangguran/*U-rate*

Menurut Yuniarti et al. (2020), *U-rate* adalah gambaran yang digunakan sebuah negara untuk menganalisis sehat atau tidaknya perekonomian. Pemanfaatan tenaga kerja di negara masih rendah mengartikan bahwa tingkat pengangguran di negara tersebut masih tinggi. Perhitungan tingkat pengangguran menggunakan penyebut yang sama, yaitu umur angkatan kerja, 15 tahun.

2.3. The Duration of Unemployment

- a. Pengangguran Terbuka
 - Merupakan situasi di mana seseorang sama sekali tidak bekerja dan tidak ada usaha atau keinginan mencari suatu pekerjaan.
- b. Setengah Menganggur/ *Underemployment*Setengah menganggur dapat diidentifikasikan sebagai situasi dimana seseorang bekerja, tetapi tidak produktif.
- c. Pengangguran terselubung/ *Disguised Unemployment*Merupakan pengangguran yang muncul akibat tenaga kerja tidak bekerja secara produktif atau maksimal.

2.4. Penggangguran Siklis

Jenis pengangguran yang disebabkan oleh aktivitas siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi yang tidak bisa diprediksi atau tidak menentu.

2.5. Natural Rate

Walaupun ekonomi suatu negara berjalan dengan baik, pasti selalu ada beberapa pengangguran, yakni:

a. Pengangguran Friksional

TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN VOLUME 3 ISSUE 1 (2023)

Pengangguran friksional terjadi ketika pekerja menghabiskan waktu mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan keterampilan mereka dan selera mereka. Hal ini dapat terjadi karena kesenjangan waktu dan informasi, serta kondisi geografis yang timbul antara lowongan pekerjaan dan si pencari kerja.

b. Pengangguran Struktural

Pengangguran structural disebabkan akibat perubahan keinginan pelanggan akan barang dan jasa tidak dapat dipenuhi oleh karyawan. Hal ini dapat terjadi ketika ada lebih sedikit pekerjaan daripada pekerja.

2.6. Job Search

Proses pencocokan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai, atau orang yang sedang menganggur dan ingin mencari sebuah pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri.

2.7. Public Policy and Job Search

Kebijakan Publik adalah seperangkat pedoman yang disiapkan oleh lembaga dan pejabat pemerintah (Hayat et al., 2018). Pihak tenaga kerja pemerintah memberikan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan untuk mempercepat pencocokan pelamar kerja dengan pekerjaan. Program pelatihan publik dimaksudkan untuk melengkapi pekerja yang terlantar dari penurunan industri dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk industri yang bertumbuh.

2.8. Inflasi

Taufiq & Kefi (2015) mendefinisikan "Inflasi ialah proses dimana harga umumnya naik dan selalu berkaitan dengan mekanisme pasar". Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu konsumsi masyarakat yang meningkat, ekses likuiditas di pasar yang menyebabkan konsumsi, dan spekulasi akibat kondisi yang tidak lancar.

2.9. Deflasi

Menurut Sahban & SE (2018) "Deflasi adalah keadaan di mana suatu negara memperoleh keuntungan dan pada saat yang sama juga menderita kerugian". Kerugian-kerugian ini akan terus terwujud ketika deflasi berputar di luar kendali.

3. METODE PENELITIAN

1) Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan dua metode yaitu deskriptif dan historis

- a. Metode Deskriptif
 - Metode yang menggambarkan hal yang ada dengan melihat keadaan serta mengumpulkan data berdasarkan fakta-fakta yang ada.
- b. Metode Historis
 - Proses pengumpulan data dengan melihat masa lalu dan masa kini untuk melihat proses perkembangan.
- 2) Teknik Pengolahan Data
- Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif. Purba et al. (2021) menjelaskan "Teknik kualitatif merupakan proses pengolahan data yang

dilakukan dengan cara membandingkan antara keadaan yang terjadi di lapangan dengan teori, yang kemudian dianalisa dan diuraikan dan yang terakhir diberikan pemecahan masalahnya".

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 Tingkat Pengangguran dan Inlfasi Kota Malang

Tahun	Jumlah Penduduk TPT Malang	Persentase Pengangguran	Jumlah Pengangguran	Inflasi
2017	674.748	7.22%	48.716	3.75%
2018	678.458	6.65%	45.117	2.98%
2019	682.055	5.88%	40.104	1.93%
2020	655.964	9.61%	63.038	1.42%
2021	658.876	9.65%	63.581	1.75%

Sumber: BPS Malang, 2021

Tabel di atas merupakan data tingkat pengangguran dan inflasi Kota Malang tahun 2017-2021 yang diperoleh dari BPS Kota Malang. Data yang tercatat pada tabel di atas merupakan presentase pengangguran dari jumlah penduduk TPT (Tingkat Pengangguran terbuka) Kota Malang. Pada tahun 2017 jumlah penduduk TPT Kota Malang sebanyak 674.748 jiwa, dengan total pengangguran sebanyak 48.716, kemudian jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2018 bertambah menjadi 678.458, dengan jumlah pengangguran yang menurun dari tahun 2017, yaitu sebanyak 45.117. Pada tahun 2019 menuju tahun 2020, terjadi penurunan jumlah penduduk TPT Kota Malang dan peningkatan pada jumlah pengangguran, hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19.Pada tahun 2021, jumlah penduduk TPT Kota Malang sebanyak 658.876 jiwa, dengan pengangguran sebanyak 63.581.

Inflasi merupakan masalah yang dihindari oleh suatu negara atauprovinsi. Oleh karena itu, penanggung jawab kotamadya harus mampu menerapkan kebijakan mengantisipasi kenaikan inflasi. Tingkat pengangguran yang tinggi menghambat baik aspirasi pertumbuhan ekonomi lokal maupun pertumbuhan ekonomi nasional (Hasan & Azis, 2018). Diketahui bahwa inflasi merupakan kenaikan harga barang pada waktu tertentu secara terus menerus. Bila tingkat inflasi berada di angka 1 sampai dengan 3%, maka masih dianggap wajar dan memperlihatkan bahwa perekonomian negara tersebutsehat. Jika dilihat dari tabel inflasi tahunan di Kota Malang, dari tahun 2011 hingga 2021 terlihat adanya kenaikan dan penurunan. Inflasi tertinggi ada pada tahun 2014, dan yang paling rendah berada pada tahun 2020. Deflasi menyebabkan pengangguran di kota Malang bertambah. Harga barang dan jasa yang menurun menyebabkan beberapa perusahaan mengalami kerugian dan mengalami penurunan omset, sehingga demi mempertahankan jalannya suatu perusahaan, banyak perusahaan yang melakukan PHK kepada karyawannya. Akibat pandemi covid-19 ini, pada tahun 2020 hingga tahun 2021 tingkat inflasi masih berada di angka 1% yang menunjukkan perekonomian Kota Malang sedang tidak baik. Kota Malang pada September 2022 mengalami inflasi sebesar 1,06% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,02. Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam menanggulangi dampak dari inflasi:

TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan Volume 3 ISSUE 1 (2023)

- 1) Pengurangan belanja Tidak Terduga
 - Dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah maka kebijakan yang dapat diambil yakni pengurangan belanja tidak terduga. dengan menjaga keterjangkauan harga beli, dan kelancaran proses penyaluran. Contohnya dengan memberikan bantuan sosial serta subsidi dari pemerintah.
- 2) Pemberian Dukungan Berupa 2% Dari Dana Alokasi Umum Untuk menanggulangi dampak inflasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari dana alokasi umum. kemudian dana tersebut digunakan untuk pemberian subsidi, bantuan sosial dan penyediaan lapangan kerja.
- 3) Meningkatkan Tarif Pajak Salah satu cara mengatasi permasalahan inflasi yaitu dengan meningkatkan tarif pajak. Dengan menaikan tarif pajakberguna untuk mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. Harga suatu barang dapatberubah tergantung dengan tingkat konsumsinya.
- 4) Memberikan Harga MaksimumUntuk Barang Tertentu Penetapan harga maksimum untuk barang yang terus mengalami inflasi dilakukan utnuk menghindari terjadinya penjualan di pasar gelap.

Kebijakan fiskal dapat digunakan sebagai pilihan pertama karena kebijakan fiskal memanfaatkan pajak sebagai bantuan untuk memperluas lapangan kerja dan untuk menekan angka pengangguran yang ada. Dengan begitu kebijakan ini dapat menjaga keseimbangan perekonomian. Langkah-langkah untuk menanggulangi dampak inflasi untuk menekan tingkat pengangguran dengan kebijakan fiskal yaitu dengan (Hutabarat, 2021):

- Mengembangkan UMKM UMKM membawa dampak yang baik bagi perekonomian negara Indonesia. Karena umkm merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Dengan banyaknya UMKM yangmuncul juga menyerap tenaga kerja sebesar 97%.
- 2) Menambah Badan Usaha MilikNegara (BUMN) Berperan penting dalam meningkatkan jumlah tenaga kerja karena pernah terdapat 2.700 lowongan kerja untuk beberapa posisi di perusahaan milik negara yang pernah dibukaoleh BUMN. Pada Maret 2022 BUMN telah membuka sebanyak41 perusahaan namun beberapa tahun terakhir ini ada perusahaanBUMN ada yang dibubarkan untuk restrukturisasi supayadapat meningkatkan produktivitas, daya saing danefisiensi dalam meningkatkan tenaga kerja.
- 3) Menyediakan Lapangan Pekerjaan pada Sektor Pariwisata Dengan membuka sektor pariwisata yang lebih luas dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan dapat menciptakan serta meningkatkan produktivitas ketenagakerjaan.
- 4) Membuat Balai Pelatihan Kerja Balai pelatihan kerja merupakan sebuah sarana pelatihan yang bertujuan untuk mencapai keterampilan sehingga dapat mendalami keahlian butuhkan dengan membuka balai pelatihan kerja dapat mengoptimalkan SDM, sehingga pekerja dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri pada aturan yang tutut perusahaan. Contohnya seperti pelatihan soft skill, dan lain-lain. pemerintah juga harus memberikan pelatihan kerja yang layak untuk calon pekerja tersebut, agar kualitas pekerja yang dihasilkan baik.
- 5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil yang menggunakan metode deskriptif dan metode historis, secara singkat dapat dapat dikatakan inflasi dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di Kota Malang meningkat pesat dari tahun 2019- 2021, hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan inflasi, banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya agar perusahaan dapat tetap bertahan. Persentase pengangguran di Kota Malang tahun 2019 sebanyak 5,88% dan di tahun 2020 menjadi 9,6% total kenaikan di tahun 2019 dan 2020 sebanyak 3.72% dengan jumlah TPT 2019 sebanyak 682.055 dan 2020 sebanyak 655.964.

Pemerintah dapat menerapkanbeberapa cara agar masalah pengangguran di Indonesia dapat di atasi seperti, mendukung UMKM, menambah BUMN, menyediakan lapangan pekerjaan pada sektor pariwisata dengan membuat "New Bali" di seluruh pelosok Indonesia untuk memancing orang asing untuk berlibur atau berinvestasi di Indonesia. Selain membuat "New bali" pemerintah juga harus menaikkan pajak rokok dan alkohol untuk "New Bali" tersebut, dengan begitu, perekonomian di Indonesia akan semakin maju dan tingkat pengangguran semakin menurun, tetapi, pemerintah juga harus memberikan pelatihan kerja yang layak untuk calon pekerja tersebut, agar kualitas pekerja yang dihasilkan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanto, A., Prasetyo, D., & Khodijah, R. (2020). Angkatan Kerja dan Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 11(2), 66–82.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal. CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Hayat, H., Malang, U. I., Pendapatan, P., & Usaha, P. (2018). Buku Kebijakan Publik. *Universitas Islam Malang Malang, Indonesia*.
- Hutabarat, E. S. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2019.
- Prayuda, M. G., Dewi, U., & Henny, M. (2015). Pengaruh Inflasi dan Investasi Terhadap Pengangguran di Provinsi Bali Tahun 1994-2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(1), 44590.
- Purba, E., Purba, B., Syafii, A., Khairad, F., Damanik, D., Siagian, V., Ginting, A. M., Silitonga, H. P., Fitrianna, N., & Arfandi, S. N. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis.
- Sahban, M. A., & SE, M. M. (2018). Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang (Vol. 1). Sah Media.
- Taufiq, M., & Kefi, B. S. (2015). Pengaruh inflasi, BI rate dan kurs terhadap indeks harga saham gabungan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 22(38).
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(3), 169–176.